



LAPORAN TRANSPARANSI

PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT BPR BATURAJA (PERSERODA)

TAHUN 2025

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 0828 RT.034 RW.01
Kel. Baturoja Lama,
Kec. Baturoja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu,
Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : 0735 3740229

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR Baturaja (Perseroda)
Alamat	Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 0828 RT 034 RW 010 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan
Nomor Telepon	0735 3740229

Penjelasan Umum:

Dalam rangka penerapan tata kelola BPR Baturaja harus memiliki sistem dan prosedur yang baik sehingga tujuannya dapat tercapai. Prinsip tata kelola harus dijalankan dan menjadi pedoman BPR Baturaja dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik sangat tercermin dari kondisi BPR Baturaja baik dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan, pelaksanaan operasional yang hati-hati, kegiatan bisnis yang berorientasi pada risiko dan memiliki sumber daya manusia yang berintegritas tinggi. BPR Baturaja sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis kepercayaan tentu memiliki standar dan mekanisme dalam menjalankan usahanya, dengan tujuan dapat menjaga kepercayaan yang "dikelolanya" tersebut. Kepercayaan adalah aset paling berharga dari nasabah yang harus dijaga oleh BPR Baturaja karena kepercayaan tersebut memberikan nilai ekonomis yang tinggi untuk BPR Baturaja dari masa sekarang hingga masa yang akan datang. Berikut prinsip – prinsip penerapan tata kelola yang harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan usaha:

1. Keterbukaan (Transparency)
2. Akuntabilitas (Accountability)
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
4. Independensi (Independency)
5. Kewajaran (Fairness)

Bank dalam pelaksanaannya telah melakukan prinsip-prinsip tata kelola tersebut dengan baik. Hal tersebut terwujud paling sedikit dalam hal :

1. Aspek Pemegang Saham;
2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris;
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
5. Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
7. Penerapan Fungsi Audit Intern;
8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud;
10. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi;
12. Rencana Bisnis BPR

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola

3. Cukup Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Fitriyadi Suhendra
-----------	------	---------------------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Persero) Nomor 025/02/ BPR.BTA/2024 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Persero) Nomor 041/02/ BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, berikut tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu:

- (1) Anggota Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- (2) Anggota Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (4) Anggota Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstem, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.
- (5) Yang dimaksud otoritas lainnya sebagaimana dimaksud angka (4) di atas adalah:
 - a. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan;
 - b. Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. Kantor Pajak; dan
 - d. Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Tugas dan Tanggung Jawab Direksi juga diatur dalam Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Persero) yang termuat dalam Akta Pendirian Tanggal 23 Juni 2016 Nomor 174 yang dibuat dihadapan H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2016 Nomor AHU-0031946.AH.01.01 dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhirnya dalam Akta Nomor 39 Tanggal 31 Desember 2025 yang pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09.0011898 dan Nomor AHU-AH.01.03.0017626 Tanggal 22 Januari 2026.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Direksi telah menindaklanjuti seluruh Rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris diantaranya tindak lanjut hasil temuan audit baik hasil audit yang dilakukan oleh:

1. Audit Internal;
2. Kantor Akuntan Publik; dan
3. Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu Direksi telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari sisi pelaporan seperti:

1. Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik;
2. Laporan Tahunan, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Tata Kelola dan Laporan Profil Risiko;
3. Laporan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank;
5. Laporan Sipesat, Laporan DTTOT, Laporan APU - PPT, Laporan Pengkinian Data Nasabah, Laporan *Individual Risk*;
6. Laporan SLIK, Laporan Restrukturisasi Kredit;
7. Laporan Publikasi Keuangan; dan
8. Laporan lainnya sesuai perundang-undangan.

Komposisi Dewan Komisaris PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Persero) tahun 2025 telah mengalami perubahan, dimana terjadi kekosongan posisi Komisaris Anggota sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 47 Tanggal 17 Februari 2025 yang ditegaskan melalui Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 6 Mei 2025 yang dibuat dihadapan H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0223751 dan kekosongan Direktur Utama sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 22 September 2025 yang dibuat dihadapan H. Iqbal Amputra, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0342945 Tanggal 26 September 2025.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Rahma Delawati
----	------	----------------

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Persero) Nomor 025/02/BPR.BTA/2024 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Persero) Nomor 041/02/BPR.BTA/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris diantaranya sebagai berikut:

- (1) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Anggota Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud anggota Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengambilan keputusan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab anggota Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank.
- (6) Anggota Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa anggota Direksi menindaklanjuti temuan audit auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- (7) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- (8) Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- (9) Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan cara kunjungan langsung minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Rekomendasi Kepada Direksi:

Berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris berikut rekomendasi dari Dewan Komisaris Kepada Direksi tahun 2025:

1. Melakukan evaluasi terhadap RBB periode semester II tahun 2024
2. Pembahasan pelaksanaan langkah dan strategi RBB tahun anggaran 2025 untuk Triwulan I
3. Melakukan RUPS atas penunjukan KAP untuk laporan tahun anggaran 2024
4. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen Risiko
5. Evaluasi penerapan Strategi Anti Fraud
6. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor OJK dan audit internal sampai dengan bulan Juni 2025
7. Rencana strategis dan langkah bisnis
8. Pengawasan Realisasi RBB Semester I Tahun 2025
9. Pembahasan pelaksanaan langkah dan strategi RBB tahun 2025 Triwulan II
10. Pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan OJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan OJK Nomor 3 tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat
12. Pengawasan Dewan Komisaris atas penerapan program APU PPT
13. Persetujuan terhadap kredit kepada pihak terkait
14. Pengawasan pengembangan SDM
15. Evaluasi RBB meliputi penyaluran kredit, penghimpunan dana dan pertumbuhan usaha
16. Pembagian deviden dari laba tahun buku 2024

17. Penilaian Kinerja Direktur Utama dan Direktur YMF Kepatuhan kepada Pemegang Saham
18. Laporan ke Pemegang Saham terkait hasil Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2025 yaitu kredit bermasalah, Nomenklatur dan peninjauan terhadap penggunaan Laba tahun 2024 estimasi dapat dilakukan pada bulan Oktober 2025 dan pemenuhan kekosongan jabatan Komisaris Anggota
19. Pembahasan surat OJK perihal perubahan nomenklatur BPR
20. Pembahasan harmonisasi terhadap perubahan nomenklatur BPR bersama Pemerintah Daerah Kabupaten OKU

Selama tahun 2025, Rekomendasi Dewan Komisaris tersebut telah ditindak lanjuti oleh Direksi diantaranya:

1. Melakukan evaluasi terhadap RBB periode semester II tahun 2024
2. Melakukan pembahasan pelaksanaan langkah dan strategi RBB tahun anggaran 2025 untuk Triwulan I
3. Melakukan RUPS atas penunjukan KAP untuk laporan tahun anggaran 2024
4. Melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen Risiko
5. Melakukan evaluasi penerapan Strategi Anti Fraud
6. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor OJK dan audit internal sampai dengan bulan Juni 2025
7. Melakukan perencanaan strategis dan langkah bisnis
8. Melakukan pengawasan realisasi RBB Semester I Tahun 2025
9. Melakukan pembahasan pelaksanaan langkah dan strategi RBB tahun 2025 Triwulan II
10. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan OJK Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan melalui training Pelindungan Konsumen
11. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan OJK Nomor 3 tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat
12. Melakukan pengawasan terhadap penerapan program APU PPT dan melakukan training bagi karyawan
13. Melakukan pengawasan terhadap persetujuan terhadap kredit kepada pihak terkait
14. Melakukan pengawasan pengembangan SDM
15. Melakukan evaluasi RBB meliputi penyaluran kredit, penghimpunan dana dan pertumbuhan usaha
16. Melakukan pembahasan terhadap pembagian deviden dari laba tahun buku 2024
17. Melakukan tindak lanjut atas penilaian Kinerja Direktur Utama dan Direktur YMF Kepatuhan kepada Pemegang Saham
18. Melakukan tindak lanjut atas laporan Dewan Komisaris ke Pemegang Saham terkait hasil Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2025 yaitu kredit bermasalah, Nomenklatur dan peninjauan terhadap penggunaan Laba tahun 2024 estimasi dapat dilakukan pada bulan Oktober 2025 dan pemenuhan kekosongan jabatan Komisaris Anggota
19. Melakukan pembahasan surat OJK perihal perubahan nomenklatur BPR
20. Melakukan pembahasan harmonisasi terhadap perubahan nomenklatur BPR bersama Pemerintah Daerah Kabupaten OKU

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Nihil

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Nihil

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Fitriyadi Suhendra
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Rahma Delawati
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Tidak terdapat kepemilikan saham baik anggota direksi maupun anggota dewan komisaris

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Fitriyadi Suhendra
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Rahma Delawati
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota direksi, anggota dewan komisaris dan pemegang saham pada kelompok usaha BPR

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Fitriyadi Suhendra
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Rahma Delawati
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada perusahaan lain

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Fitriyadi Suhendra
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Rahma Delawati
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak terdapat hubungan keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Fitriyadi Suhendra
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Rahma Delawati
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak terdapat hubungan keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

11. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp422.727.273
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp262.109.088

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp469.090.909
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp110.789.585
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp39.931.229

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp45.818.182
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp20.000.003

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp75.761.000
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp70.039.800

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	3,04 : 1
-------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,07 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	7,50 : 1
-------------	----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	0,94 : 1
-------------	----------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	1,82 : 1
-------------	----------

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	30 Januari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pencapaian Target Bisnis akhir tahun 2024 (Semester II Tahun 2024)
2. Pembahasan Pelaksanaan Langkah Strategi RBB 2025 untuk Trwulan I
3. RUPS Penunjukan KAP audit laporan keuangan tahun buku 2024

2.	Tanggal Rapat	14 Februari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Rekomendasi penilaian kinerja Komisaris Anggota PT BPR Baturaja (Persero)

3.	Tanggal Rapat	20 Mei 2025
	Jumlah Peserta	1 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Laporan terkait hasil pemeriksaan umum OJK
2. Kekosongan Komisaris Anggota
3. Proses perubahan nomenklatur PT BPR Baturaja (Perseroda)

4.	Tanggal Rapat	15 Juli 2024
----	---------------	--------------

	Jumlah Peserta	3 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan realisasi RBB semester I tahun 2025
2. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor OJK dan Audit Internal sampai dengan periode Juni 2025
3. Pengawasan terhadap tindak lanjut surat dari OJK
4. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap penerapan APU PPT
5. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
6. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat
7. Persetujuan terhadap penyaluran kredit kepada pihak terkait

5.	Tanggal Rapat	19 September 2025
----	---------------	-------------------

	Jumlah Peserta	1 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

Penilaian Kinerja Direksi PT BPR Baturaja (Perseroda)

6.	Tanggal Rapat	01 Desember 2025
----	---------------	------------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pengawasan terhadap realisasi RBB tahun 2025 sampai dengan periode November 2025
2. Rekomendasi penunjukan KAP pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025
3. Pembahasan waktu pelaksanaan RUPS RBB tahun 2026
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan Audit Internal sampai dengan periode November 2025
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut surat dari OJK sampai dengan periode November 2025
6. Persetujuan terhadap penyaluran kredit kepada pihak terkait

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun di sepanjang tahun 2025.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Rahma Delawati
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Tidak terdapat penyimpangan internal (internal fraud) baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap PT BPR Baturaja (Persero)

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Tidak terdapat masalah hukum yang dihadapi

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT BPR Baturaja (Persero) selama tahun 2025

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	23 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PEMERINTAH KABUPATEN OKU
	Penjelasan Kegiatan	BANTUAN CSR KEGIATAN SOSIAL BAZAR PANGAN PEMKAB OKU
	Jumlah (Rp)	Rp23.500.000,-
2.	Tanggal Pelaksanaan	24 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PEMERINTAH KABUPATEN OKU
	Penjelasan Kegiatan	BANTUAN CSR PERMOHONAN PANGAN MURAH PEMKAB OKU
	Jumlah (Rp)	Rp33.020.305,-
3.	Tanggal Pelaksanaan	31 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	MASJID BAITURRAHMAN
	Penjelasan Kegiatan	BANTUAN CSR PEMBANGUNAN KUBAH MASJID BAITURRAHMAN
	Jumlah (Rp)	Rp10.000.000,-
4.	Tanggal Pelaksanaan	31 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	MASJID AL HIDAYAH
	Penjelasan Kegiatan	BANTUAN CSR PEMASANGAN BATU ALAM TIANG MASJID AL HIDAYAH
	Jumlah (Rp)	Rp12.608.000,-
5.	Tanggal Pelaksanaan	31 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	DINAS PENDIDIKAN KAB OKU
	Penjelasan Kegiatan	BANTUAN CSR PERBAIKAN TOILET SD DIKNAS OKU
	Jumlah (Rp)	Rp23,364,224,-
6.	Tanggal Pelaksanaan	31 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB OKU
	Penjelasan Kegiatan	BANTUAN CSR BIBIT DAN KOTAK SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB OKU
	Jumlah (Rp)	Rp11.300.000,-

Pada tahun 2025 dana CSR yang dialokasikan sebesar 3% dari Laba Bersih Tahun buku 2024 atau sebesar Rp113,040,610,- dan masih terdapat sisa CSR dari Tahun Sebelumnya sebesar Rp751,918,-

Dana CSR sebesar Rp113,792,528,- tersebut telah disalurkan ke berbagai sektor dengan pembagian sebagai berikut:

1. Sektor Ekonomi sebesar Rp36,500,000,- dalam rangka kegiatan bantuan Pasar Murah di Desa Tegai Arum dan Baturaja Permai.
2. Sektor Pendidikan sebesar Rp23,364,224,- dalam rangka bantuan pembangunan toilet SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten OKU.
3. Sektor Sosial Budaya sebesar Rp20,020,305,- dalam rangka bantuan kegiatan Pasar Murah di Masjid As Solihin Sukaraya.
4. Sektor Lingkungan sebesar Rp11,300,000,- dalam rangka bantuan bibit dan kotak sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU.
5. Sektor Keagamaan sebesar Rp 22,608,000,- dalam rangka pembangunan kubah masjid serta pembangunan tiang masjid di wilayah OKU.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR Baturaja (Perseroda) untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Baturaja, 02 April 2026
PT BPR Baturaja (Perseroda)



Rahma Delawati, S.E., M.Si
Komisaris Utama

H. Romson Fitri, S.H., M.H
Komisaris

Disahkan,

H. Teddy Meliwansyah, S.STP., M.M., M.Pd
Bupati Kabupaten OKU

Radius Susanto, S.E.
Direktur Perumda Pasar Kabupaten OKU